

Rapor Biru Pengelolaan Dana Haji

Selain likuid dan aman, dana kelolaan haji ini menghasilkan surplus yang terus meningkat. Wajar saja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Oleh Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Institute

NAIK-NAIK ke puncak gunung. Itulah gambaran pas untuk laporan keuangan pengelolaan dana haji tahun 2020. "Seluruh indikator keuangan penting, seperti aset, investasi, dana kelolaan, dan nilai manfaat, naik. Kewajiban lancarnya dapat ditopang dengan alat likuiditasnya. Jadi, dana haji sesungguhnya sangat likuid".

Bukan hanya likuid, tapi juga relatif paling aman, karena investasinya banyak "ditanam" di instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) – yang dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tidak di instrumen yang penuh risiko seperti di pasar saham, ataupun investasi yang tidak jelas seperti saham-saham "gorengan".

Menurut laporan keuangan BPKH, per Desember 2020, dana haji yang dikelola BPKH mencapai Rp144,91 triliun, atau meningkat 16,56% dibandingkan dengan 2019 yang tercatat Rp124,32 triliun. Nah, jika dikaitkan dengan target pada 2020, capaian target dana haji adalah 103,83%.

Jika dibedah, alokasi dana haji terkonsentrasi di BPS-BPIH sebesar Rp45,33 triliun (31,3%) dan Rp99,58 triliun (68,7%). Investasi terdistribusi dalam instrumen surat berharga Syariah Rp98,47 triliun, investasi lainnya dalam negeri Rp1,03 triliun, dan investasi luar negeri Rp74 miliar. Menurut laporan keuangan, tidak terdapat investasi langsung di infrastruktur atau proyek-proyek "mangkrak".

Alhasil, aset total meningkat 16% menjadi Rp145,77 triliun dari periode 2019 yang sebesar Rp125,26 triliun. Peningkatan aset ini dipengaruhi oleh peningkatan investasi jangka panjang. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh aturan (PP Nomor 5 Tahun 2018), selain juga kesempatan meraih imbal hasil yang lebih tinggi, maka pilihan pada investasi jangka panjang.



Anggota V BPK Bahrullah Akbar saat menyerahkan secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Tahun 2020 di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V kepada Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu yang digelar di Kantor Pusat BPK, Selasa 29 Juni 2021. (Foto: Dok. BPK)

Aman dan Likuid

Posisi penempatan dana BPS menurun 16,51% menjadi Rp45,33 triliun di 2020 dari Rp54,29 triliun. Posisi penempatan dana memang seharusnya menurun. Itu disebabkan oleh adanya amanat PP Nomor 5 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa komposisi antara penempatan dan investasi setelah tiga tahun BPKH berdiri adalah 30% : 70%. Jadi, harus lebih besar ke investasi – agar memberi nilai manfaat lebih tinggi untuk kesejahteraan calon jemaah haji.

Simak saja. Nilai investasinya terus berkembang dari tahun ke tahun. Tahun 2020 lalu, investasi BPKH menyentuh angka Rp99,58 triliun. Atau, naik tajam sebesar 42,21% dibandingkan dengan posisi 2019 yang sebesar Rp70,02 triliun. Komposisi investasi dari tenor jatuh tempo, tercatat Rp90 triliun jangka panjang dan Rp8,8 triliun jangka pendek.

Strategi itu tentu sudah diperhitungkan, terutama mengenai kebutuhan likuiditas yang meski dominan dalam jangka panjang, kemampuan likuiditasnya memadai. Itu bisa dilihat dari kas, penempatan di bank-bank syariah yang sewaktu-waktu bisa dicairkan. Jadi, pengelolaan dana haji ini tidak hanya aman, tapi juga likuid.

Lebih membanggakan. Nilai manfaat dari investasi dan penempatan juga mendaki. Tahun 2020 lalu total nilai manfaat yang diperoleh mencapai Rp7,43 triliun. Itu terdiri atas nilai manfaat penempatan Rp2,08 triliun (27,99%) dan nilai manfaat dari investasi Rp5,35 triliun (72,01%). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, total nilai manfaat ini terjadi kenaikan Rp67 miliar.

Menurut pandangan analis, peningkatan nilai manfaat ini adalah sebuah prestasi dalam kondisi krisis

ekonomi akibat pandemi COVID-19. Lihat saja, dibandingkan dengan target 2020, maka kinerja realisasi mencapai 103,9%. Itu artinya pula, pilihan investasi dan penempatan selain mendapat nilai manfaat yang optimal, sekaligus merupakan pilihan strategi yang tepat di tengah pandemi COVID-19.

Di lain sisi – pengelolaan biaya, seperti beban penyelenggaraan, beban operasional BPKH, tampak lebih efisien. Ada penurunan beban penyelenggaraan ibadah haji karena pada 2020 pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan haji akibat pandemi COVID-19. Sejalan dengan itu – meski ada peningkatan beban operasional, seperti beban pegawai, beban penyusutan aset tetap, dan beban amortisasi aset tak berwujud, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan nilai manfaat secara keseluruhan.

Rapor pengelolaan dana haji 2020 – yang dilakukan oleh BPKH – bisa disebut biru atau kinerjanya sangat bagus, baik dari sisi pertumbuhan maupun dari sisi rasio keuangan, seperti rasio likuiditas yang jauh dari cukup. Juga, rasio solvabilitas yang tampak sangat memadai.

Rasio likuiditas wajib – kemampuan BPKH menyediakan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), seperti terlihat dalam laporan keuangan BPKH, tampak lebih dari 2X seperti yang diamanatkan UU Nomor 34 Tahun 2014 – di mana BPKH wajib menjaga 2X BPIH. Jadi, tidaklah benar, BPKH tidak likuid. Justru BPKH sangat likuid.

Hal yang tak kalah pentingnya adalah rasio solvabilitas atau *leverage ratio*. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan BPKH atas pelunasan utang, dan seluruh kewajiban dengan menggunakan jaminan dan aset neto (harta kekayaan dalam bentuk apa pun)

yang dimiliki dalam jangka panjang dan jangka pendek. Rasio solvabilitas BPKH dari tahun ke tahun terus membaik. Jika 2019 sebesar 104%, kini (2020) naik menjadi 108%.

Opini WTP dari BPK

Tak berlebihan – menurut opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas laporan keuangan BPKH, yang terdiri atas Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Neto, dan laporan Realisasi Anggaran, mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Itu artinya akuntabilitas pengelolaan dana haji oleh BPKH ini merupakan yang ketiga kalinya berturut-turut sejak BPKH menyusun laporan keuangan tahun 2018.

Menurut Anggito Abimanyu, Kepala Badan Pelaksana BPKH, bagi BPKH opini WTP atas laporan keuangan BPKH ini merupakan hal yang sangat penting. "Hal ini menjadi bukti akuntabilitas pengelolaan dana haji. Opini WTP ini untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan dana haji yang *prudent*," kata Anggito.

Selain itu, menurut Anggito, opini WTP ini menjadi bukti bahwa dana haji telah dikelola secara profesional, hati-hati, transparan, dan akuntabel. "Selain itu, opini WTP ketiga kalinya ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji ini aman, dan likuid sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku," Anggito menegaskan.

Tahun 2020, di tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, pengelolaan dana haji oleh BPKH, baik dari sisi pertumbuhan, rasio keuangan maupun *governance*, dapat disebut "rapornya biru" atau berkinerja sangat bagus – yang pada akhirnya untuk peningkatan pelayanan calon jemaah haji Indonesia.



Badan Pengelola Keuangan Haji

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BPKH 2020 (AUDITED)

Periode Desember 2020

NERACA

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2020	31 Des 2019
	(Audited)	(Audited)

ASET

Aset Lancar

Aset Tidak Lancar

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Panjang

Pendapatan nilai manfaat yang ditangguhkan

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

JUMLAH LIABILITAS

ASET NETO

Tanpa Pembatasan

Dengan Pembatasan

JUMLAH ASET NETO

JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2020	31 Des 2019
	(Audited)	(Audited)

ASET NETO TANPA PEMBATASAN

ASET NETO DENGAN PEMBATASAN

Dana BPIH

Dana Abadi Umat

Total Aset Neto Dengan Pembatasan

TOTAL ASET NETO

Aset Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi

Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi

Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan

Kenaikan (penurunan) Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun

Kas dan Setara Kas Pada Akhir Desember 2020

LAPORAN ARUS KAS

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2020	31 Des 2019
	(Audited)	(Audited)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Investasi

Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan

Kenaikan (penurunan) Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun

Kas dan Setara Kas Pada Akhir Desember 2020

LAPORAN OPERASIONAL

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2020	31 Des 2019
	(Audited)	(Audited)

Pendapatan setoran jamaah berangkat

Beban Penyelenggaraan ibadah Haji Kementerian Agama

Surplus/(Defisit) BPIH

Pendapatan nilai manfaat Dana PIH

Penyaluran untuk rekening virtual/ Beban operasional BPKH

Surplus/(Defisit) Dana PIH

Pendapatan nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU)

Penyaluran program kemaslahatan

Surplus/(Defisit) DAU

Akumulasi Surplus/(Defisit)

Penggunaan nilai manfaat akumulasi tahun sebelumnya

Total Surplus/(Defisit)

Penghasilan/(Beban) komprehensif lain

Total Surplus Komprehensif

DEWAN PENGAWAS

- Ketua : Dr. Yuslam Fauzi, SE, MBA
- Anggota : Khasan Faizi, SE, M.Si
- Anggota : Moh. Hatta, Ak., MBA
- Anggota : Dr. KH Marsyudi Syuhud
- Anggota : Ir. Suhaj Lestidi, ME
- Anggota : Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA, CA, Ak
- Anggota : Dr. Abd Hamid Paddu, MA

BADAN PELAKSANA

- Kepala : Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc
- Anggota : Dr. Ir. Ajar Susanto Broto, MM
- Anggota : Dr. Rahmat Hidayat, SE, MT
- Anggota : Dr. Huriyah El Islamy, LLB (hons), M.CL, Ph.D

ISO 9001:2015

ISO 37001:2016

Jakarta, 5 Juli 2021